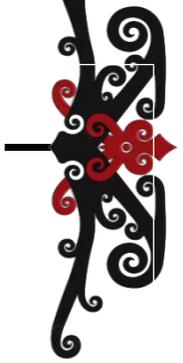


**RENCANA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN UKM  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI dan UKM  
Jl. Kolonel Soetadji No. 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212  
Kode Pos 77212**



**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa ALLAH.S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat didalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas selama 1 (Satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tidak luput dari kekurangan-kekurangan, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi antar Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM.

Tanjung Selor, 29 April 2024

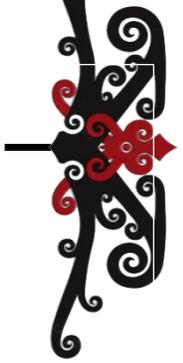
Kepala Dinas



**Dj. Hasriyani, SH., MM**

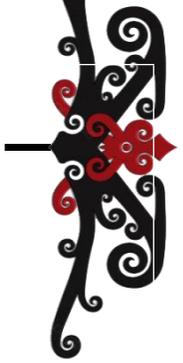
**Pembina TK. I, IV/b**

**NIP. 19730717 200312 2 008**



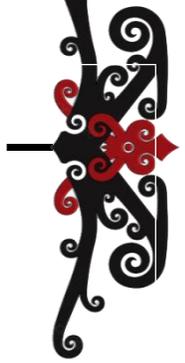
## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b> .....	<b>11</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	48
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	51
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	67
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DARAH</b> .....	<b>68</b>
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi.....	68
3.1.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.....	68
3.1.2 Telahaan terhadap Prioritas Provinsi.....	71
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	79
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>81</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>103</b>



## DAFTAR TABEL

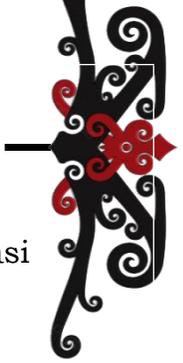
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024.....	18
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Utara.....	51
Tabel 2.4	Usulan Program kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Utara.....	67
Tabel 3.1	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang mendukung Prioritas Nasional.....	68
Tabel 3.2	Indikasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Yang Mendukung Sepuluh Prioritas Daerah.....	71
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	82



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pasal 272 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026. Menurut pasal 273 Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD, rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Sejalan dengan pengertian tersebut, dokumen Renja Disperindagkop dan UKM tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Disperindagkop dan UKM dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi pokok. Dokumen Renja 2025 menjadi acuan bagi Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program pembangunan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Visi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu **“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”** dan tema RKPD tahun 2025 yaitu **“Pemantapan Industri dan Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah”** didalam Renja ini memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD 2025.

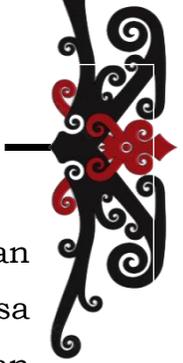


Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir;
- f. penetapan.

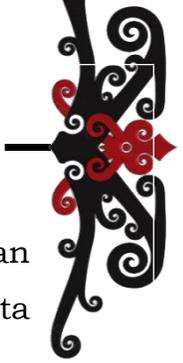
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM akan melaksanakan Program yang mendukung tercapainya visi dan misi tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah program rutin yang mendukung terlaksananya program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koprasi dan UKM dengan didukung 5 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan antara lain Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.



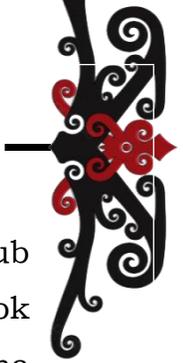
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi melaksanakan pengawasan terhadap Koperasi yang wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi didukung dengan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan sub kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi melaksanakan pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas dan anggota koperasi di Provinsi Kalimantan Utara yang didukung dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dal 1 (satu) Daerah Provinsi dan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) melaksanakan sosialisasi permodalan dan bantuan usaha bagi UMKM di Provinsi Kalimantan Utara dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan dan sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan, Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan dan sub kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Kecil.
5. Program Pengembangan UMKM melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM dan koperasi di Provinsi Kalimantan Utara dengan kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi



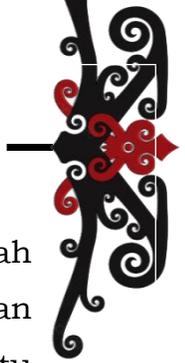
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

6. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan melaksanakan sosialisasi terkait Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) didukung dengan kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) dan sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Layanan Penerbitan Layanan Penerbitan SKA, Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar sub kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya.
7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan melaksanakan kegiatan Sub Ongkos Angkut Barang ke daerah 3T dan melanjutkan pembangunan sarana perdagangan tahap kedua yang didukung oleh kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas dan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi, sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta sub kegiatan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.
8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting melaksanakan pengawasan terkait stabilisasi harga kebutuhan pokok dan pening di Kalimantan Utara dengan didukung kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor serta Koordinasi dan Sinkronisasi



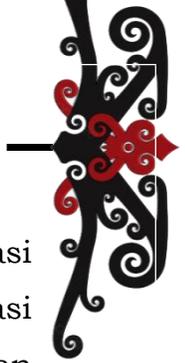
Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan dengan sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota dan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya dengan sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida.

9. Program Pengembangan Ekspor melaksanakan pembinaan kepada para pelaku agar berorientasi ekspor dan melakukan promosi terhadap produk UMKM didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan sub kegiatan Pameran Dagang Internasional/ Nasional, Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan, Peningkatan Citra Produk Ekspor.
10. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen melaksanakan pengawasan barang dan jasa yang beredar serta operasional BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) didukung dengan kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen, Peningkatan Hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen dan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kegiatan Pelaksanaan



Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi, Pengembangan Layanan Pengujian, Pemantauan Mutu Produk dan Pengembangan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi Layanan.

11. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri melaksanakan kegiatan terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Provinsi Kalimantan Utara didukung dengan kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan sub kegiatan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi dan Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.
12. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri melaksanakan kegiatan pembinaan penyusunan RPIK dan pembangunan KIPI Tana Kuning di dukung dengan kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, serta Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
13. Program Pengendalian Izin Usaha Industri melaksanakan kegiatan pengawasan terkait perizinan industry besar yang ada di Provinsi Kalimantan Utara didukung dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi serta sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi dan Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).
14. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional melakanakan pengawasan terkait penyediaan informasi industri pada aplikasi SIINas didukung dengan kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI,

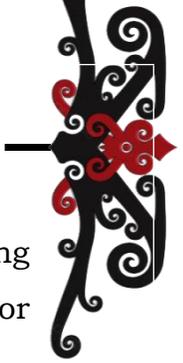


IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) serta sub kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas dan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas.

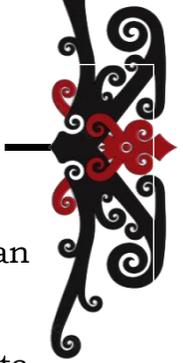
## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana kerja tahunan ini, antara lain :

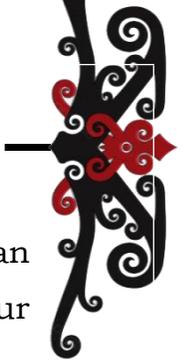
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5492);



- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan (Tambahkan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahkan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- k. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- l. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- q. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman



- Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - s. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
  - t. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
  - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 459 Tahun 2018);
  - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
  - y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - z. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

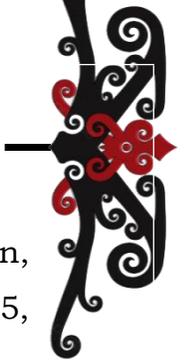


050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- aa. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
- ab. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037;
- ac. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2038;
- ad. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- ae. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- af. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
- ag. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM selama 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.



Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara hingga tahun 2025.
- b. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2025 dan prakiraan tahun 2025.
- c. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025.
- d. Menjadi pedoman penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2025; dan
- e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyajian rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

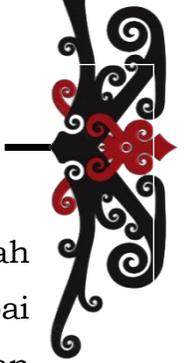
##### **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

##### **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

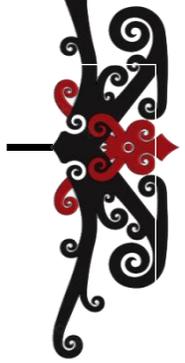
##### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**



Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

#### **Bab V Penutup**

Pada bagian ini Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



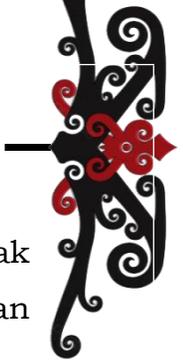
## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

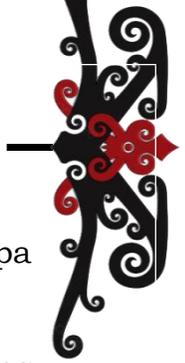
Pada pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun 2023 di Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara terdapat target kinerja yang tidak tercapai, tercapai serta melebihi target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023, dimana tidak terdapat sub kegiatan yang tidak mencapai target, terdapat 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan mencapai target dan 1 (satu) sub kegiatan yang melebihi target dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan



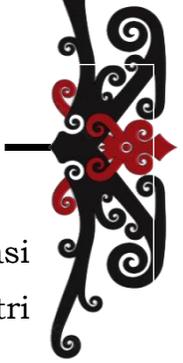
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Dan Sub Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat.
- c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dan Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM Untuk Menjadi Usaha Yang Tangguh Dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengentasan Kemiskinan.
- d. Program Pengembangan Ekspor, Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Dan Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor, Pameran Dagang Internasional/Nasional, Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan dan Peningkatan Citra Produk Ekspo.
- e. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas dengan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi.
- f. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan sub kegiatan Operasi Pasar dalam



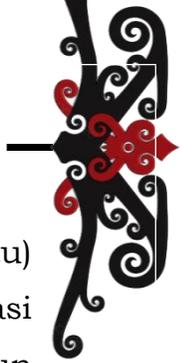
rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

- g. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dan dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor, Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor, Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota, Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi.
- h. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen Dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Dan Sub Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen.
- i. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi.
- j. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Penyusunan, Penerapan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran Dan Perwilayahan Industri, Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
- k. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan sub kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis



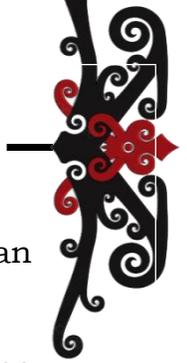
Industri Provinsi melalui SIINas dan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas.

2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :
  - a. Program Pengembangan UMKM, Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Dan Sub Kegiatan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain Dan Teknologi.
  
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
  - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja :
    - Untuk kinerja terpenuhi tetapi untuk serapan anggaran tidak terpenuhi dikarenakan juknis tidak ada UMKM yang meminta batuan hukum untuk penyelesaian kasus terkait UMKM;
    - Pembangunan Pusat Distribusi Tulin Onsoi mencapai 60 persen karena terkendala tersedianya bahan bangunan.
  
  - b. Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerja :
    - Tidak terjadi refocusing anggaran pada sub kegiatan
    - Manajemen pelaksanaan kegiatan yang baik
    - Menjadikan indikator sebagai tolak ukur pelaksanaan kegiatan
  
  - c. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja :
    - Target capaian yang ditetapkan terlalu rendah sementara anggaran tersedia mampu mengakomodir target capaian yang direncanakan
  
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
  - a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah



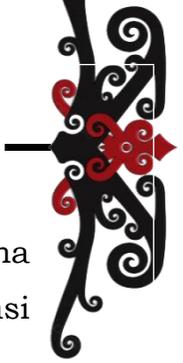
Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan target kinerja Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT sebesar 26,89% dan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 15,35%. Implikasi yang ditimbulkan adalah dengan adanya pelatihan kepada anggota dan pengurus koperasi maka dapat meningkatkan koperasi yang melaksanakan RAT dan koperasi sehat di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan koperasi yang melaksanakan RAT sehingga Koperasi sehat di Provinsi Kalimantan Utara semakin meningkat.

- b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan target kinerja Persentasi UMKM yang mengakses KUR sebesar 56,67% dan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 55,67%. Implikasi yang ditimbulkan adalah dengan meningkatnya UMKM yang mengakses kredit perbankan dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara.
- c. Program Pengembangan UMKM dengan target kinerja Persentase pertumbuhan UKM baru sebesar 5% dan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 23,59%. Implikasi yang ditimbulkan dengan meningkatnya pertumbuhan UKM dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi serta membantu mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara.
- d. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan target kinerja Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun sebesar 25% dan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 25%. Implikasi yang ditimbulkan dengan adanya pencapaian kinerja ini adalah tersedianya sarana distribusi perdagangan di Provinsi Kalimantan Utara yang berguna untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan bahan penting di Provinsi Kalimantan Utara.
- e. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan target kinerja Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu sebesar 6% dan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 6%. Impikasi yang disebabkan



adalah terjaminnya stabilitas harga kebutuhan bahan pokok dan bahan penting di Provinsi Kalimantan Utara.

- f. Program Pengembangan Ekspor dengan target kinerja Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara sebesar 16% dan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 16%. Implikasi yang ditimbulkan dari pencapaian kinerja ini adalah meningkatnya jenis komoditi ekspor di Provinsi Kalimantan Utara dan dapat menambah nilai ekspor di Provinsi Kalimantan Utara.
- g. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan target kinerja Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar sebesar 1% dan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 1%. Implikasi yang ditimbulkan adalah dengan berkurangnya barang yang tidak memenuhi syarat ketentuan jual maka akan memperbesar peredaran barang yang memenuhi syarat dan dapat melindungi hak konsumen.
- h. Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga sebesar 80% dan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 80%. Implikasi yang ditimbulkan dari pencapaian ini adalah dengan meningkatnya pembinaan terhadap pelaku usaha akan meningkatkan jumlah pelaku usaha yang tergabung ke dalam sistem e-catalog dalam pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Utara sehingga dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara.
- i. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan target kinerja Persentase industri, kecil dan menengah yang sehat sebesar 35% dan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 35%. Implikasi yang ditimbulkan dari pencapaian ini adalah dengan meningkatnya industri kecil menengah yang sehat maka akan memperkuat perekonomian dan dapat menghasilkan produk unggulan daerah yang dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.
- j. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan target kinerja kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun sebesar 93% dan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 90%. Implikasi yang ditimbulkan ada dapat



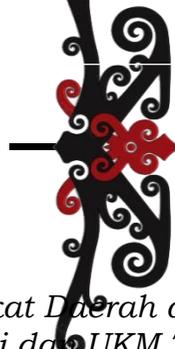
meningkatkan nilai ekspor di Provinsi Kalimantan Utara karena para pelaku ekspor di harapkan menggunakan SKA dari Provinsi Kalimantan Utara

- k. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan target kinerja Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana sebesar 100% dan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100%. Implikasi yang ditimbulkan dari pencapaian ini adalah dengan meningkatnya Industri yang masuk dan terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) akan meningkatkan pengelolaan terhadap data Industri yang terintegrasi dan terupdate dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai bentuk kontribusi pengembangan Industri nasional secara keseluruhan.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- a. Perlunya pembinaan, pembahasan dan sosialisasi baik dari sisi intern dinas untuk meningkatkan sistem kinerja dan tanggung jawab dalam merancang/merencanakan program.
  - b. Melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatan dan mengevaluasi untuk dilakukan perbaikan di setiap kegiatan yang telah dan akan dilakukan.
  - c. Melakukan koordinasi dengan lebih baik dan optimal dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, sehingga dapat menghasilkan sinkronisasi kegiatan dan data antara provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.

Hasil pelaksanaan evaluasi renja perangkat daerah tahun 2023 sebesar 78,18%. Pada saat renja ini disusun evaluasi renja 2023 terdapat perubahan indikator sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 untuk renja tahun 2024 sehingga indikator tahun 2022, 2023 dan 2025 berbeda, hasil evaluasi disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :



**Rencana Kerja Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**



Tabel 2.1

*Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2024*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun berjalan (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output) sesuai Kepmendagri 050-5889	Target dan realisasi Kinerja dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun (n-2) (2023)	Realisasi PD Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan s / d tahun berjalan ( tahun n-1 ) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	3a	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>											
<b>Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah</b>											
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	85 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	17 Dokumen	17 Dokumen	0%	17 Dokumen	34 Dokumen	40%
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	0%	2 Dokumen	4 Dokumen	40%
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	65 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	13 Dokumen	13 Dokumen	0%	13 Dokumen	26 Dokumen	40%



## Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



							dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
2.17.0 1.1.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Dokumen	0	Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	0%	2	Dokumen	4	Dokumen	40%
<b>2.17.0 1.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>60</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>36</b>	<b>Bulan</b>	<b>60%</b>
2.17.0 1.1.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN	60	Bulan	12	Bulan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	564	Orang/Bulan	564	Orang/Bulan	100%	564	Orang/Bulan	1140	Orang/Bulan	1900%
2.17.0 1.1.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Bulan	12	Bulan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1218	Dokumen	1218	Dokumen	100%	1218	Dokumen	2448	Dokumen	4080%
<b>2.17.0 1.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>60</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>36</b>	<b>Bulan</b>	<b>60%</b>
2.17.0 1.1.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	240	stel	285	stel	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	-	0	-	0%	0	-	285	-	119%
2.17.0 1.1.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66	Orang	4	Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	18	Orang	120%	13	Orang	35	Orang	53%
<b>2.17.0 1.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>60</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>36</b>	<b>Bulan</b>	<b>60%</b>
2.17.0 1.1.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	65	Unit	3	Unit	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	100%	4	Unit	11	Unit	17%



## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



2.17.0 1.1.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	Bulan	12	Bulan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	14	Paket	23%
2.17.0 1.1.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60	Bulan	12	Bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	5	Paket	100%	5	Paket	22	Paket	37%
2.17.0 1.1.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	Bulan	12	Bulan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	9	Paket	9	Paket	100%	9	Paket	30	Paket	50%
2.17.0 1.1.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10800	Eksemplar	0	Eksemplar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2500	Dokumen	2500	Dokumen	0%	2500	Dokumen	5000	Dokumen	46%
2.17.0 1.1.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	710	Kali	210	Kali	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130	Laporan	130	Laporan	100%	140	Laporan	480	Laporan	68%
<b>2.17.0 1.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>63</b>	<b>Unit</b>	<b>0</b>	<b>Unit</b>	<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>23</b>	<b>Unit</b>	<b>23</b>	<b>Unit</b>	<b>0%</b>	<b>23</b>	<b>Unit</b>	<b>46</b>	<b>Unit</b>	<b>73%</b>
2.17.0 1.1.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	63	Unit	0	Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23	Unit	23	Unit	0%	23	Unit	46	Unit	73%
<b>2.17.0 1.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>60</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>36</b>	<b>Bulan</b>	<b>60%</b>
2.17.0 1.1.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	8200	pcs	1640	pcs	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	1644	Laporan	20%
2.17.0 1.1.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	Bulan	12	Bulan	dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Laporan	6	Laporan	100%	6	Laporan	24	Laporan	40%



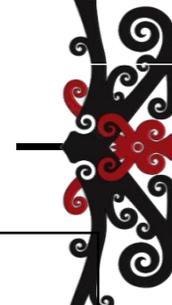
**Rencana Kerja Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**



2.17.0 1.1.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60 Unit	12 Unit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	16 Laporan	27%
<b>2.17.0 1.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya</b>	<b>60 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100%</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>36 Bulan</b>	<b>60%</b>
2.17.0 1.1.09 .01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	8 Unit	0 Unit	-	0 -	0 -	0%	0 -	0 -	0%
2.17.0 1.1.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%
2.17.0 1.1.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	5 Ruangan	5 Ruangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
<b>2.17</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi &amp; UKM</b>										
<b>2.17.0 3</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT</b>	<b>36,16 %</b>	<b>0 %</b>	<b>persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT</b>	<b>23,58 %</b>	<b>15,35 %</b>	<b>0%</b>	<b>23,58 %</b>	<b>23,58 %</b>	<b>65%</b>
<b>2.17.0 3.1.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Koperasi yang tertib administrasi</b>	<b>76 %</b>	<b>0 %</b>	<b>Persentase Koperasi yang tertib administrasi</b>	<b>64 %</b>	<b>65 %</b>	<b>0%</b>	<b>64 %</b>	<b>128 %</b>	<b>168%</b>



**Rencana Kerja Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**



2.17.0 3.1.01 .01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan	250	Kop eras i	0	Koperasi	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	14	Un Usah a	14	Unit Usaha	0%	33	Unit Usaha	47	Unit Usaha	19%
<b>2.17.0 5</b>	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT</b>	<b>71</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>0%</b>
<b>2.17.0 5.1.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dal 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat</b>	<b>325</b>	<b>Pes ert a</b>	<b>0</b>	<b>Peserta</b>	<b>Jumlah pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat</b>	<b>0</b>	<b>Pese rta</b>	<b>0</b>	<b>Peserta</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>Pesert a</b>	<b>0</b>	<b>Pesert a</b>	<b>0%</b>
2.17.0 3.1.01 .01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan Perkoperasian	325	Pes erta	0	Peserta	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	0	Oran g	0	Orang	0%	0	Orang	0	Orang	0%
<b>2.17.0 7</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Persentasi UMKM yang mengakses KUR</b>	<b>62,6 7</b>	<b>%</b>	<b>45,46</b>	<b>%</b>	<b>Persentasi UMKM yang mengakses KUR</b>	<b>56,67</b>	<b>%</b>	<b>55,67</b>	<b>%</b>	<b>98%</b>	<b>58,67</b>	<b>%</b>	<b>58,67</b>	<b>%</b>	<b>94%</b>
<b>2.17.0 7.1.01</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR</b>	<b>290</b>	<b>UM KM</b>	<b>58</b>	<b>UMKM</b>	<b>Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR</b>	<b>58</b>	<b>UMK M</b>	<b>58</b>	<b>UMKM</b>	<b>100%</b>	<b>63</b>	<b>UMKM</b>	<b>179</b>	<b>UMKM</b>	<b>62%</b>



**Rencana Kerja Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**



2.17.0 7.1.01 .01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam mengakses KUR	317	UMKM	35	UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	70	Unit Usaha	70	Unit Usaha	100%	63	Unit Usaha	168	Unit Usaha	53%
<b>2.17.0 8</b>	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM</b>	<b>9,5</b>	<b>%</b>	<b>1,93</b>	<b>%</b>	<b>Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM</b>	<b>5</b>	<b>%</b>	<b>5</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>6,5</b>	<b>%</b>	<b>6,5</b>	<b>%</b>	<b>68%</b>
<b>2.17.0 8.1.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Menengah</b>	<b>Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi Usaha Menengah</b>	<b>369</b>	<b>UMKM</b>	<b>15</b>	<b>Unit Usaha</b>	<b>Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi Usaha Menengah</b>	<b>51</b>	<b>Pelaku Usaha</b>	<b>51</b>	<b>Pelaku Usaha</b>	<b>100%</b>	<b>71</b>	<b>Pelaku Usaha</b>	<b>137</b>	<b>Pelaku Usaha</b>	<b>37%</b>
2.17.0 8.1.01 .01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan/ pendampingan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Design dan Teknologi	296 0	UMKM	683	Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan/pendampingan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Design dan Teknologi	480	Unit usaha	429	Unit usaha	89%	600	Unit usaha	1712	Unit usaha	58%



**Rencana Kerja Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**



<b>3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>											
<b>3.30</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>											
<b>3.30</b>	<b>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</b>	<b>kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun</b>	<b>98 %</b>	<b>0 %</b>	<b>kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun</b>	<b>93 %</b>	<b>90 %</b>	<b>0%</b>	<b>95 %</b>	<b>95 %</b>	<b>97%</b>	
<b>3.30.0</b> <b>2.1.04</b>	<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>	<b>Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun</b>	<b>18.843 Form</b>	<b>0 Form</b>	<b>Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun</b>	<b>2.916 Form</b>	<b>2916 Form</b>	<b>0%</b>	<b>3.209 Form</b>	<b>6125 Form</b>	<b>33%</b>	
3.30.0 2.1.04 .01	Koordinasi dan sinkronisasi Layanan Penerbitan Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Pelaku Usaha yang terlayani	90 Pelaku Usaha / UKM	0 Pelaku Usaha / UKM	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	2 Dokumen	2 Dokumen	0%	2 Dokumen	4 Dokumen	4%	
<b>3.30.0</b> <b>3</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>	<b>Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>100%</b>	<b>25 %</b>	<b>25 %</b>	<b>25%</b>	
<b>3.30.0</b> <b>3.1.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas</b>	<b>Jumlah Pembangunan dan pusat distribusi regional dan provinsi yang dikelola</b>	<b>5 lokasi</b>	<b>1 lokasi</b>	<b>Jumlah Pembangunan dan pusat distribusi regional dan provinsi yang dikelola</b>	<b>1 lokasi</b>	<b>1 lokasi</b>	<b>100%</b>	<b>1 lokasi</b>	<b>3 lokasi</b>	<b>60%</b>	
3.30.0 3.1.01 .01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi yang disediakan atau dibangun	17 lokasi	28 lokasi	Jumlah sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi yang disediakan atau dibangun	17 lokasi	14 lokasi	82%	17 lokasi	59 lokasi	347%	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Unit	1 Unit		1 Unit	3 Unit	100%	



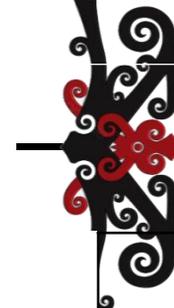
**Rencana Kerja Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**



3.30.0 3.1.01 .01	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengendalian pusat distribusi yang dilaksanakan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	0 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
<b>3.30.0 4</b>	<b>Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu</b>	<b>6 %</b>	<b>6 %</b>	<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu</b>	<b>6 %</b>	<b>6 %</b>	<b>100%</b>	<b>6 %</b>	<b>6 %</b>	<b>100%</b>
<b>3.30.0 4.1.01</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang penting</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>0 Jenis</b>	<b>Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang penting</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>0%</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>24 Jenis</b>	<b>200%</b>
3.30.0 4.1.01 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	<13 %	0 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	12 Laporan	0%	12 Laporan	12 Laporan	100%
3.30.0 4.1.01 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Koefisien Variasi Harga Barang Penting Antar Waktu	<13 %	0 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	12 Laporan	0%	12 Laporan	24 Laporan	100%
<b>3.30.0 4.1.02</b>	<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan</b>	<b>Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang penting</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>100%</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>100%</b>



**Rencana Kerja Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**



3.30.0 4.1.02 .01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Wilayah	<15 %	0 %	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Lapo ran	12 Laporan	0%	12 Lapora n	12 Lapora n	100%
3.30.0 4.1.02 .02	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	47 Kali	12 Kali	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Lapo ran	9 Laporan	450%	2 Lapora n	23 Lapora n	100%
3.30.0 4.1.03	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Persentase Jumlah Penyaluran Pupuk Bersubsidi</b>	<b>80 %</b>	<b>0 %</b>	<b>Persentase Jumlah Penyaluran Pupuk Bersubsidi</b>	<b>80 %</b>	<b>90 %</b>	<b>0%</b>	<b>0 %</b>	<b>80 %</b>	<b>100%</b>
3.30.0 4.1.03 .01	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	24 Kali	0 Kali	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	5 Lapo ran	5 Laporan	0%	0 Lapora n	5 Lapora n	100%
3.30.0 5	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara</b>	<b>8 %</b>	<b>62,5 %</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara</b>	<b>8 %</b>	<b>8 %</b>	<b>100%</b>	<b>5 %</b>	<b>5 %</b>	<b>63%</b>
3.30.0 5.1.01	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi</b>	<b>196 Pel aku Usa</b>	<b>90 Pelaku Usaha/ UKM</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi</b>	<b>86 Pela ku Usah</b>	<b>87 Pelaku Usaha</b>	<b>101%</b>	<b>93 Pelaku Usaha</b>	<b>269 Pelak u Usaha</b>	<b>137%</b>



**Rencana Kerja Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**



	melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		ha/ UK M										
3.30.0 5.1.01 .01	Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang Internasional, nasional dan lokal	99 Pela ku Usa ha/ UK M	8	Pelaku Usaha/U KM	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	20 Pelak u Usah a	25 Pelaku Usaha	125%	27 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	27%	
3.30.0 5.1.01 .03	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang	30 Pela ku Usa ha/ UK M	0	Pelaku Usaha/U KM	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	30 Pelak u Usah a	25 Pelaku Usaha	0%	30 Pelaku Usaha	55 Pelaku Usaha	100%	
3.30.0 5.1.01 .04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	jumlah produk yang ditingkatkan citranya	24 Pro duk	0	Produk	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	6 Prod uk	7 Produk	0%	6 Produk	13 Produ k	25%	
3.30.0 5.1.01 .05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Potensi Ekspor yang dibina	540 Pela ku Usa ha/ UK M	82	Pelaku Usaha/U KM	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	30 Pelak u Usah a	0 Pelaku Usaha	0%	30 Pelaku Usaha	112 Pelaku Usaha	6%	
<b>3.30.0 6</b>	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar</b>	<b>0,5 %</b>	<b>1 %</b>		<b>Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar</b>	<b>1 %</b>	<b>1 %</b>	<b>100%</b>	<b>1 %</b>	<b>1 %</b>	<b>200%</b>	
3.30.0 6.1.01	Pelaksanaan perlindungan Konsumen di seluruh daerah Kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/kota	5 Kab upa ten /Ko ta	2	Kabupat en/Kota	Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/kota	0 Kabup ate n/Ko ta	0 Kabupa ten/Kot a	0%	5 Kabup aten/ Kota	7 Kabup aten/ Kota	140%	



## Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



3.30.0 6.1.01 .01	Pemberdayaan Konsumen dan kelembagaan perlindungan Konsumen	Jumlah Permasalahan konsumen yang diselesaikan oleh BPSK	127	Permasalahan	24	Permasalahan	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	0	BPSK	0	BPSK	0%	2	BPSK	0	BPSK	2%
3.30.0 6.1.01 .02	Peningkatan Hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah Rakor dengan instansi terkait yang dilaksanakan	71	Rakor	0	Rakor	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	0	LPKSM	0	LPKSM	0%	2	LPKSM	0	LPKSM	3%
<b>3.30.0 6.1.03</b>	<b>Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa disluruh daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah Pengawasan yang dilakukan di kabupaten/kota</b>	<b>5</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>5</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengawasan yang dilakukan di kabupaten/kota</b>	<b>5</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>5</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>5</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>5</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>
3.30.0 6.1.03 .01	peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan /atau jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	25	Kegiatan	10	Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12	Laporan	12	Laporan	100%	5	Laporan	27	Laporan	20%
<b>3.30.0 7</b>	<b>Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga</b>	<b>90 %</b>		<b>80 %</b>		<b>Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga</b>	<b>80 %</b>		<b>78 %</b>		<b>98%</b>	<b>85 %</b>		<b>85 %</b>		<b>94%</b>
<b>3.30.0 7.1.03</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase Kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern</b>	<b>90 %</b>		<b>80 %</b>		<b>Persentase Kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern</b>	<b>80 %</b>		<b>80 %</b>		<b>100%</b>	<b>85 %</b>		<b>245 %</b>		<b>272%</b>
3.30.0 7.1.03 .01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang telah terfasilitasi dalam Penggunaan Produk dalam Negeri	100	Pelaku Usaha	20	Pelaku Usaha	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan takeholder, Tokoh asyarakat atau Influencer	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	22	Laporan	1%



## Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



3.30.0 7.1.03 .02	Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	125 0	Peserta	0	Peserta	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	Laporan	0	Laporan	0%	1	Laporan	1	Laporan	0%
3.30.0 7.1.03 .03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal dan menyampaikan data informasi perdagangan antar pulau	58	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	0	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	0%	0	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	0%
<b>3.31.0 2</b>	<b>Urusan Perindustrian</b>																
<b>3.31.0 2</b>	<b>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</b>	<b>Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>33 %</b>	<b>33 %</b>	<b>100%</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
<b>3.31.0 2.1.01</b>	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>16</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>3</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>4</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>4</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>10</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>63%</b>
3.31.0 2.1.01 .02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan	5	Kegiatan	2	Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3	Dokumen	3	Kegiatan	100%	1	Dokumen	6	Kegiatan	20%
3.31.0 2.1.01 .04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah layanan sarana dan prasarana industri yang terbangun dan termanfaatkan	2	Sarana	1	Sarana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2	Dokumen	3	Sarana	150%	1	Dokumen	5	Sarana	50%
3.31.0 2.1.01 .05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri	12	Kegiatan	2	Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan	2	Dokumen	2	Kegiatan	100%	2	Dokumen	6	Kegiatan	17%



**Rencana Kerja Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**



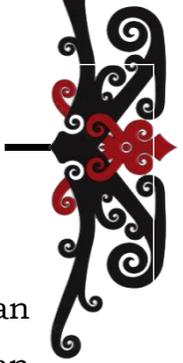
	Masyarakat				Industri dan Peran Serta Masyarakat										
3.31.0 2.1.01 .05	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana	Jumlah dokumen yang disampaikan	1 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	1 Dokumen	0%				
<b>3.31.0 3</b>	<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>	<b>Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>	<b>60 %</b>	<b>60 %</b>	<b>60%</b>				
3.31.0 3.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	27 Perusahaan	0 Perusahaan	Jumlah industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	0 Perusahaan	0 Perusahaan	0%	23 Perusahaan	23 Perusahaan	85%				
3.31.0 3.1.01 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah perusahaan yang di awasi	27 Perusahaan	0 Perusahaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0 Perusahaan	0%	1 Dokumen	1 Perusahaan	4%				
<b>3.31.0 4</b>	<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>	<b>Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>0 %</b>	<b>Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0%</b>	<b>60 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>				



Rencana Kerja Tahun 2025  
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



3.31.0 4.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau	1 Inf or ma si	0 Infor mas i	Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau	1 Infor masi	1 Infor masi	100%	1 Infor masi	1 Infor masi	100%
3.31.0 4.01.0 2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah industri berizin yang terpublish di SIINAS	30 Per usa haa n	0 Perusa haan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	8 Doku men	12 Perusa haan	150%	27 Dokum en	25 Perusa haan	90%
3.31.0 4.01.0 3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah perusahaan yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	25 Per usa haa n	0 Perusa haan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Doku men	5 Perusa haan	250%	23 Dokum en	21 Perusa haan	92%

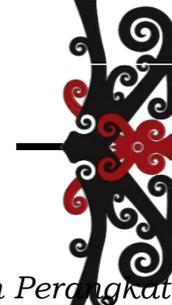


## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan sesuai dengan tugas dan fungsi maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM maka tidak menerapkan SPM. Sehingga tabel 2.2 disajikan sebagai berikut :



Rencana Kerja Tahun 2025  
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertumbuhan koperasi sehat	5%	5%	5%	5%	70,37%	18,30%	10,48%	10,20%	11,11%	Dari Tahun 2021 hingga 2023 pertumbuhan koperasi sehat mengalami penurunan berturut-turut karena penyesuaian kewenangan yang pada tahun 2021 kewenangan provinsi seluruh koperasi pada tahun 2022 hingga kewenangan Provinsi merupakan koperasi lintas provinsi, diharapkan tahun 2024 dan 2025 terdapat peningkatan koperasi sehat
2	Pertumbuhan UMKM naik kelas	3%	5%	5,50%	5,80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Untuk capaian UKM naik kelas tidak terdata
3	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang Kaltara pada	5,20%	5,70%	6,30%	6,60%	57,70%	45,68%	-16,57%	8,6%	5,20%	Pada tahun 2021 s/d 2023 Ekspor Kalimantan Utara



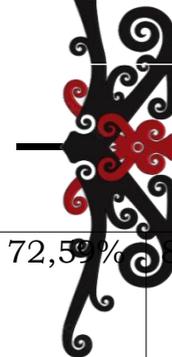
Rencana Kerja Tahun 2025  
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



Tahun	n										mengalami penurunan
4	Laju Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	1%	1.8%	2%	2.4	9,09%	11,11%	6,77%	8,4%	9,92%	Berdasarkan Persentase Laju pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2022 sebesar 11,11% dan pada tahun 2022 sebesar 6,77 %, sehingga Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB mengalami penurunan sebesar 4,34% .
5	Persentase kontribusi sektro industri terhadap PDRB	9,20%	9,23%	9,28%	9,33%	8,97%	7,77%	7,67%	8,00%	8,20%	Berdasarkan Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB tahun 2021 - 2023 mengalami peningkatan ditargetkan pada tahun 2024 dan 2025 tetap mengalami peningkatan



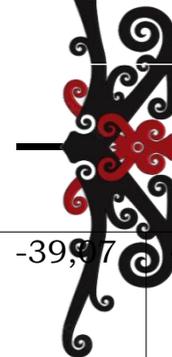
Rencana Kerja Tahun 2025  
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



6	Persentase Koperasi Aktif	70%	71%	71,70%	72,00%	70,37%	70,25%	72,59%	73,67%	79,63%	Dari Tahun 2021 hingga 2023 pertumbuhan koperasi aktif mengalami fluktuatif dikarena penyesuaian kewenangan yang pada tahun 2021 kewenangan provinsi seluruh koperasi pada tahun 2022 hingga kewenangan Provinsi merupakan koperasi lintas provinsi, diharapkan tahun 2024 dan 2025 terdapat peningkatkan koperasi aktif, tetapi proyeksi tetap fluktuatif
7	Pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR	1.97%	1.99%	2%	2%	39%	12%	-10%	1,80%	2,80%	Dari tahun 2021 hingga 2023 pertumbuhan UMKM yang mengakses KUR mengalami penurunan dikarenakan adanya covid sehingga banyak usaha yang tutup
8	Pertumbuhan UMKM	5%	5%	6.5%	8.0%	59,35	-42,23	23,11	33,11%	43,11%	Pertumbuhan UMKM mengalami fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2023 pada tahun 2022 mengalami penurunan karena terjadi penyesuaian data



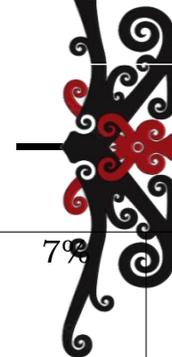
Rencana Kerja Tahun 2025  
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



9	Pertumbuhan Nilai Ekspor bersih Kaltara	1,80%	2,10%	2,30%	2,60%	78,42%	57,70%	-39,97%	4,80%	3,60%	Pertumbuhan nilai ekspor bersih kaltara mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2022. ditargetkan pada tahun 2024 dan 2025 mengalami peningkatan dengan program prioritas nasional untuk dapat meningkatkan nilai ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa
10	Persentase Inflasi Pangan Bergejolak	3 ± 1%	3 ± 1%	3 ± 1%	3 ± 1	3,8	3,25	2,4	2,50%	2,50%	Inflasi pangan di Provinsi semakin baik setiap tahunnya tetapi kenaikan konsumsi yang belum diimbangi dengan perbaikan rantai pasok bisa membuat harga pangan bergejolak, meski pasokan memadai, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu menjaga inflasi pangan bergejolak .



Rencana Kerja Tahun 2025  
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



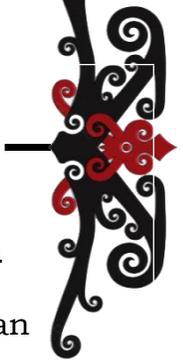
11	Persentase Barang yang tidak sesuai standar	7%	6%	5%	5%	7%	7%	7%	7%	7%	Lemahnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk. Masih ditemukan banyak barang beredar yang tidak memenuhi standar dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha masih tergolong rendah.
12	Persentase peningkatan Kontribusi Sub Sektor perdagangan Produk Lokal terhadap PDRB	10%	15%	20%	25%	16%	24%	46%	48%	50%	Rendahnya pertumbuhan sektor perdagangan, dikarenakan kurang stabilitasnya harga dan pasokan barang kebutuhan penting sehingga untuk meningkatkan stabilitas maka dilaksanakan kegiatan pengendalian Inflasi yang tinggi pada sektor pangan terutama saat Hari Besar Keagamaan Peningkatan Penggunaan Produk Lokal dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan penggunaan produk lokal agar



Rencana Kerja Tahun 2025  
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



											dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui kontribusi perdagangan produk lokal secara domestik maupun ke luar daerah karena hal itu penentuan target dan proyeksi sama.
13	Persentase peningkatan kontribusi sektor industri	13.30%	14.41%	15.52%	16.63%	27,28	26	-13	2%	2,50%	Berdasarkan Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB tahun 2021 - 2023 mengalami penurunan ditargetkan pada tahun 2024 dan 2025 tetap mengalami peningkatan

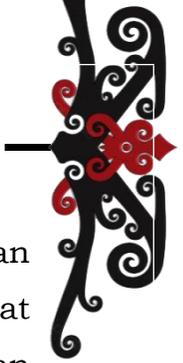


### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Peran dan posisi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan PD dalam lingkup Provinsi Kalimantan Utara maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dengan potensi yang begitu besar yang ada di Provinsi Kalimantan Utara mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia yang sangat potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum bisa mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah. Hal ini merupakan sebuah tantangan dan pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terdapat permasalahan yang di hadapi, yaitu

- 1) Rendahnya pertumbuhan sektor industri. Berdasarkan Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB tahun 2022 sebesar 7,77% dan pada tahun 2023 sebesar 7,67 %, sehingga Persentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB mengalami penurunan sebesar 0,10%.
- 2) Rendahnya pertumbuhan sektor perdagangan, dikarenakan kurang stabilitasnya harga dan pasokan barang kebutuhan penting sehingga



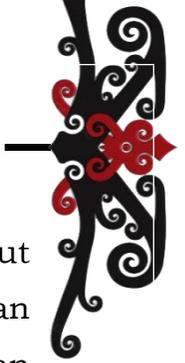
untuk meningkatkan stabilitas maka dilaksanakan kegiatan pengendalian Inflasi yang tinggi pada sektor pangan terutama saat Hari Besar Keagamaan Peningkatan Penggunaan Produk Lokal dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan penggunaan produk lokal agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui kontribusi perdagangan produk lokal secara domestik maupun ke luar daerah.

- 3) Penurunan neraca perdagangan ekspor barang di Kalimantan Utara. Pada tahun 2023 terdapat penurunan neraca perdagangan sebesar 16,57%. Sehingga perlu menjaga stabilitas neraca perdagangan agar terus naik dan tidak mengalami penurunan. Salah satu program prioritas nasional untuk dapat meningkatkan nilai ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa.
- 4) Lemahnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk. Masih ditemukan banyak barang beredar yang tidak memenuhi standar dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha masih tergolong rendah.
- 5) Rendahnya kemampuan para pelaku UMKM/Pelaku Usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang berbasis sumber daya lokal dan dapat bersaing. Sumber Daya Alam Lokal yang tersedia di Kalimantan Utara banyak belum dimanfaatkan untuk dijadikan produk unggulan daerah.
- 6) Belum optimalnya pelaku UMKM dalam mengakses KUR. Pada tahun 2023 dari 16.090 UMKM pada tahun 2022 turun menjadi 14.571 UMKM karena hal itu penentuan target dan proyeksi sama.
- 7) Rendahnya Koperasi Sehat di Kalimantan Utara, Koperasi sehat adalah Koperasi Aktif, Koperasi yang telah melaksanakan RAT (Rapat Akhir Tahunan) selama 3 (Tiga) Tahun berturut-turut dan memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi). Pada tahun 2023 terdapat 710 Koperasi Aktif dan hanya ada 124 Koperasi yang masuk kategori koperasi sehat karena hal itu penentuan target dan proyeksi sama.

Dengan banyaknya permasalahan yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, maka bisa berdampak pada pencapaian visi misi kepala daerah yang sudah



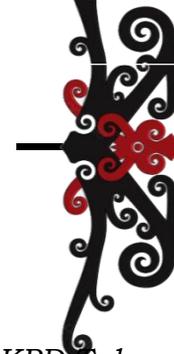
## Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



ditentukan. Karena dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut diperlukan kerja keras dan juga biaya yang sangat banyak, sedangkan anggaran yang tersedia sangat minim. Dengan semua kekurangan dan keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, tapi sebagai tantangan untuk mendapat peluang yang sangat baik di masa depan.



**Rencana Kerja Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**



**2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

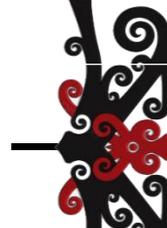
*Tabel 2.3*  
*Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025*  
*Provinsi Kalimantan Utara*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20.431.238.44 3	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.568.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				20.431.238.44 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				12.568.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	12.568.000.00 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	100 %	12.568.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	17 Dokumen	520.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	17 Dokumen	520.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	400.000.000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	400.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	50.000.000	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	50.000.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	70.000.000	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	70.000.000



## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

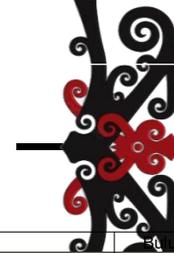


	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>9.020.000.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>9.020.000.000</b>	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bulungan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	7.620.000.000	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bulungan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	7.620.000.000
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bulungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1218 Dokumen	1.400.000.000	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bulungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1218 Dokumen	1.400.000.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>300.000.000</b>	
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 stel	-	6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 stel	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kalimantan Utara dan Luar Kalimantan Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	300.000.000	7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kalimantan Utara dan Luar Kalimantan Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	300.000.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.949.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.949.000.000</b>	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.000.000	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.000.000
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	23.000.000	9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	23.000.000
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	225.000.000	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	225.000.000
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	9 Paket	125.000.000	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bulungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	9 Paket	125.000.000
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bulungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2500 Dokumen	12.000.000	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bulungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2500 Dokumen	12.000.000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bulungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	1.500.000.000	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bulungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	1.500.000.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>35.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>35.000.000</b>	
14	Pengadaan Mebel	Kabupaten	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Paket	35.000.000	14	Pengadaan Mebel	Kabupaten	Jumlah Paket Mebel	23 Paket	35.000.000



## Rencana Kerja Tahun 2025

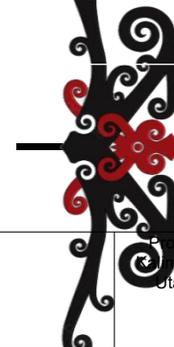
### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



		Bulungan			4	Bulungan	yang Disediakan				
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>137.000.000</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>137.000.000</b>
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bulungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12.000.000	15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bulungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.000.000
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bulungan	dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	110.000.000	16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bulungan	dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	110.000.000
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bulungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	15.000.000	17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bulungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	15.000.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharannya</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>607.000.000</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharannya</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>607.000.000</b>
19	Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bulungan		0 Unit	-	19	Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bulungan		Unit	-
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bulungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	180.000.000	20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bulungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	180.000.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bulungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	427.000.000	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bulungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	427.000.000
	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		<b>persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT</b>	<b>31,52 %</b>	<b>370.000.000</b>		<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		<b>persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT</b>	<b>31,52 %</b>	<b>370.000.000</b>
	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase Koperasi yang tertib administrasi</b>	<b>74 %</b>	<b>370.000.000</b>		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase Koperasi yang tertib administrasi</b>	<b>74 %</b>	<b>370.000.000</b>
22	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Utara (Koperasi Lintas Kabupaten dalam	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	25 Unit	370.000.000	22	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Utara (Koperasi Lintas Kabupaten dalam	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan	38 Unit	370.000.000
											- Melakukan pengawasan koperasi kewenangan Provinsi (Mei 2024 sebanyak 43 Provinsi, koperasi aktif 38 Unit yg tidak aktif 5 unit)



## Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

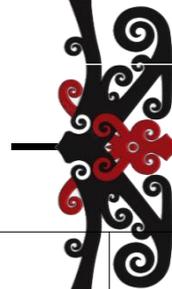


		Provinsi Kalimantan Utara)				Provinsi Kalimantan Utara)	Masyarakat				
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		<b>Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT</b>	<b>66 %</b>	<b>600.000.000</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		<b>Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT</b>	<b>66 %</b>	<b>600.000.000</b>	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat	75 Peserta	600.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat	75 Peserta	600.000.000	
23	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Bulungan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 Orang	600.000.000	2 3 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Bulungan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 Orang	600.000.000	- Pelatihan dan sertifikasi bagi pengurus & pengawas koperasi
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		<b>Persentasi UMKM yang mengakses KUR</b>	<b>60,67 %</b>	<b>3.141.181.301</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		<b>Persentasi UMKM yang mengakses KUR</b>	<b>60,67 %</b>	<b>2.100.000.000</b>	
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR	68 UMKM	3.141.181.301	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR	68 UMKM	2.100.000.000	
24	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	68 Unit Usaha	2.041.181.301	2 4 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 Unit Usaha	1.000.000.000	- Sosialisasi Pembiayaan, Target disesuaikan (target unit usaha adalah pelaku umkm ) - Operasional tim Monev KUR - Pendampingan KUR dengan tenaga pendamping KUR - Fasilitasi UMKM mengikuti pameran - Hari UMKM Nasional
25	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan		Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	240 UMKM	900.000.000	2 5 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan		Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	240 UMKM	500.000.000	Sosialisasi perspres no 2 tahun 2020 tentang pengembangan kewirausahaan Nasional
26	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil		Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	50 Unit	200.000.000	2		Jumlah Unit Usaha Kecil	50 Unit Usaha	600.000.000	Aplikasi SIKOPERKU



## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

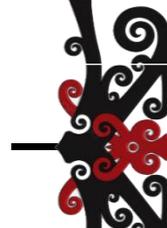


				Usaha		6	Usaha Kecil					fitur layanan pengembangan aplikasi
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		<b>Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM</b>	8 %	3.752.057.142		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		<b>Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM</b>	8 %	3.752.057.142	
	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>		<b>Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi Usaha Menengah</b>	93 UMKM	3.752.057.142		<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>		<b>Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi Usaha Menengah</b>	93 UMKM	3.752.057.142	
27	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi. Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan/pendampingan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Design dan Teknologi	720 Unit Usaha	3.752.057.142	27	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi. Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan/pendampingan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Design dan Teknologi	720 Unit Usaha	3.752.057.142	(Proyeksi DAK Tahun 2025 Rp 2, 5 M dan Dana Pendukung 40% dari anggaran DAK ) dan target menyesuaikan kelompok umkm yg akan mendapatkan hibah berdasarkan hasil verifikasi dan target DAK 518
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				16.400.000.000		<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				36.325.000.000	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				13.900.000.000		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				32.325.000.000	
	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		<b>kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun</b>	97 %	325.000.000		<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		<b>kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun</b>	97 %	300.000.000	
	<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>		<b>Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun</b>	3530 Form	125.000.000		<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>		<b>Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun</b>	3530 Form	250.000.000	
28	Koordinasi dan sinkronisasi Layanan Penerbitan Layanan Penerbitan SKA	Tarakan dan Nunukan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	12 Dokumen	125.000.000	28	Koordinasi dan sinkronisasi Layanan Penerbitan Layanan Penerbitan SKA	Tarakan dan Nunukan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	12 Dokumen	250.000.000	- Sosialisasi penggunaan dokumen SKA - Koordinasi terkait pengajuan IPSKA Provinsi - Sosialisasi Perjanjian bilateral dan multilateral



## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

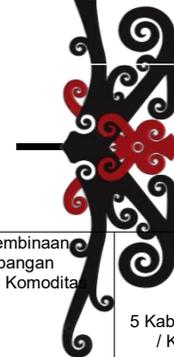


	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor		Jumlah rekomendasi Izin Usaha SIUP-MB	1 Dokumen	100.000.000		enerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor		Jumlah rekomendasi Izin Usaha SIUP-MB	0 Dokumen	-	
29	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Kabupaten / Kota	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	100.000.000	29	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Kabupaten / Kota	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	-	tidak terdapat Toko Bebas Bea
	PPengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Jumlah pengawasan pada distributor dan distribusi Perdagangan Bahan Berbahaya	1 Laporan	100.000.000		PPengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Jumlah pengawasan pada distributor dan distribusi Perdagangan Bahan Berbahaya	1 Laporan	50.000.000	
30	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Distribusi, Laporan Pengemasan Pengawasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	75 Dokumen	100.000.000	30	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	5 Kabupaten / Kota	umlah Distribusi, Laporan Pengemasan Pengawasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1 Dokumen	50.000.000	sesuai Permedag terbaru yang dilakukan pengawasan adalah distributor, di Kaltara hanya ada kantor cabang bukan distributor
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun</b>	<b>0 %</b>	<b>9.000.000.000</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun</b>	<b>0 %</b>	<b>25.300.000.000</b>	
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		Jumlah Pembangunan dan pusat distribusi regional dan provinsi yang dikelola	1 lokasi	9.000.000.000		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		Jumlah Pembangunan dan pusat distribusi regional dan provinsi yang dikelola	1 lokasi	25.300.000.000	
31	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kab. Malinau dan Kab. Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 Unit	8.900.000.000	31	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kab. Malinau dan Kab. Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Unit	25.000.000.000	- Pembangunan Gudang Pusat Distribusi Regional - Kajian FS Pembangunan Pusat Distribusi - Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Pasar Bunyu - Subsidi Ongkos Angkut
32	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	0 Laporan	-	32	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	0 Laporan	-	Tidak ada pada renstra



## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

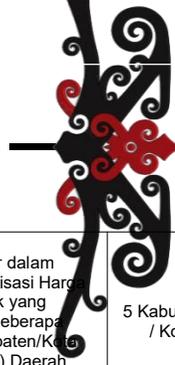


33	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	4 Orang	100.000.000	3 3	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	4 Orang	300.000.000	- Mengakomodir Pasar Lelang Program dari Pemerintah Pusat - Melakukan pelatihan admin untuk kegiatan pasar lelang - Sosialisasi terkait pelaksanaan Pasar Lelang
	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu</b>	<b>6 %</b>	<b>1.100.000.000</b>		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu</b>	<b>6 %</b>	<b>1.900.000.000</b>	
	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang penting</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>500.000.000</b>		<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah ketersediaan barang pokok dan barang penting</b>	<b>12 Jenis</b>	<b>500.000.000</b>	
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	250.000.000	3 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	250.000.000	Pemantauan harga barang kebutuhan Pokok
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	250.000.000	3 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	250.000.000	Pemantauan harga barang kebutuhan Penting
	<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>		<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah</b>	<b>6 %</b>	<b>425.000.000</b>		<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>		<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah</b>	<b>6 %</b>	<b>1.225.000.000</b>	
36	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	225.000.000	3 6	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	225.000.000	Pemantauan Stok Barang Pokok dan Barang Penting



## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

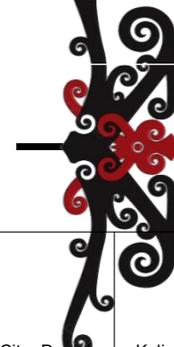


37	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	200.000.000	37	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	1.000.000.000	Operasi Pasar pada HBKN (Prosi Subsidi telah disesuaikan)
	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</b>		Persentase Jumlah Penyaluran Pupuk Bersubsidi	80 %	175.000.000		<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</b>		Persentase Jumlah Penyaluran Pupuk Bersubsidi	80 %	175.000.000	
38	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	12 Laporan	100.000.000	38	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	12 Laporan	100.000.000	Pengawasan Pupuk bersama tim Pengawasan Pupuk Subsidi yang melibatkan beberapa OPD
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	2 Laporan	75.000.000	39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	2 Laporan	75.000.000	Rapat Tim Pengawasan Pupuk Kaltara dan Produsen Pupuk
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		<b>Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara</b>	<b>7 %</b>	<b>1.625.000.000</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		<b>Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara</b>	<b>7 %</b>	<b>2.800.000.000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi</b>	<b>61 Pelaku Usaha</b>	<b>1.625.000.000</b>		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>		<b>Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi</b>	<b>61 Pelaku Usaha</b>	<b>2.800.000.000</b>	
40	Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Luar Negeri dan Luar Kaltara	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	20 Pelaku Usaha/ UKM	750.000.000	40	Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Luar Negeri dan Luar Kaltara	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	20 Pelaku Usaha/ UKM	1.000.000.000	Mengikuti pameran di Jepang dan Eropa serta luar Kalimantan Utara
41	Pameran Dagang Lokal	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	27 Pelaku Usaha/ UKM	270.000.000	41	Pameran Dagang Lokal	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	30 Pelaku Usaha/ UKM	300.000.000	Melakukan pameran di Provinsi Kalimantan Utara
42	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Luar Kaltara	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha/ UKM	250.000.000	42	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Luar Kaltara	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha/ UKM	1.000.000.000	- Melakukan misi dagang dan bussiner matching dengan negara tujuan -Melakukan pelatihan UMKM untuk go Ekspor



## Rencana Kerja Tahun 2025

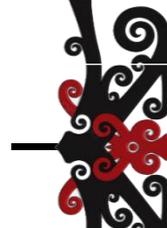
### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



43	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kalimantan Utara	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	8 Produk	355.000.000	43	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kalimantan Utara	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	10 Produk	500.000.000	- Melakukan pengembangan produk dan kompetensi pelaku usaha agar memenuhi syarat ekspor - Pendampingan produk - Melakukan identifikasi/Pengelompokkan kelas UKM Kaltara
	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar</b>	<b>0,5 %</b>	<b>800.000.000</b>		<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar</b>	<b>0,5 %</b>	<b>975.000.000</b>	
	<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/kota</b>	<b>5 Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.000</b>		<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/kota</b>	<b>5 Kabupaten/Kota</b>	<b>675.000.000</b>	
44	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2 BPSK	75.000.000	44	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2 BPSK	300.000.000	Pelatihan dan Operasional BPSK di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan
45	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	2 LPKSM	75.000.000	45	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	2 LPKSM	75.000.000	tidak terdapat LPKSM di Kaltara
46	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Ditangani Pengaduan Konsumen yang	12 Pengaduan	50.000.000	46	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Ditangani Pengaduan Konsumen yang	12 Pengaduan	300.000.000	Penanganan pengaduan konsumen
	<b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pengujian dan sertifikasi Mutu Produk yang dilaksanakan</b>	<b>5 %</b>	<b>300.000.000</b>		<b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase pengujian dan sertifikasi Mutu Produk yang dilaksanakan</b>	<b>5 %</b>	<b>-</b>	
47	Pengembangan Layanan Kalibrasi		Jumlah Diterbitkan Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan	3 Sertifikat	100.000.000	47	Pengembangan Layanan Kalibrasi		Jumlah Diterbitkan Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan	0 Sertifikat	-	tidak tersedia sarana dan prasarana pendukung layanan kalibrasi
48	Pengembangan Layanan Pengujian		Jumlah Laporan/ Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	12 Laporan	100.000.000	48	Pengembangan Layanan Pengujian		Jumlah Laporan/ Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	0 Laporan	-	tidak tersedia sarana dan prasarana pendukung layanan pengujian
49	Pemantauan Mutu Produk		Jumlah produk potensial yang dipantau	3 Produk	50.000.000	49	Pemantauan Mutu Produk		Jumlah produk potensial yang dipantau	0 Produk	-	tidak tersedia sarana dan prasarana pendukung layanan mutu produk
50	Pengembangan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi Layanan		Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	3 Sertifikat	50.000.000	50	Pengembangan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi Layanan		Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	0 Sertifikat	-	tidak tersedia sarana dan prasarana pendukung layanan sertifikasi



## Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengawasan yang dilakukan di kabupaten/kota	5 Kabupaten/Kota	300.000.000		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengawasan yang dilakukan di kabupaten/kota	5 Kabupaten/Kota	300.000.000	
51	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	5 Laporan	300.000.000	51	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	5 Laporan	300.000.000	Pengawasan barang beredar dan jasa
	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		<b>Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga</b>	<b>90 %</b>	<b>1.050.000.000</b>		<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		<b>Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga</b>	<b>90 %</b>	<b>1.050.000.000</b>	
	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern	85 %	1.050.000.000		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern	85 %	1.050.000.000	
52	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan takeholder , Tokoh asyarakat atau Influencer	1 Laporan	500.000.000	52	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan takeholder , Tokoh asyarakat atau Influencer	1 Laporan	500.000.000	Gernas BBI
53	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	550.000.000	53	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	550.000.000	Sosialisasi P3DN
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>2.500.000.000</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>4.000.000.000</b>	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana</b>	<b>67 %</b>	<b>1.700.000.000</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana</b>	<b>67 %</b>	<b>3.200.000.000</b>	
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	5 Kegiatan	1.700.000.000		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	5 Kegiatan	3.200.000.000	
54	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	200.000.000	54	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dokumen	300.000.000	- Hilirasi Industri - Kajian Pembentukan sentra IKM Kab. Malinau & Nunukan



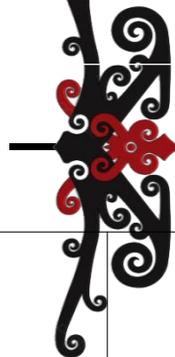
## Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



55	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Bulungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	200.000.000	55	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Bulungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	200.000.000	Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Industri
56	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Bulungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	700.000.000	56	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Bulungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	700.000.000	- Penyediaan sarana prasarana Rumah Kemasan
57	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	600.000.000	57	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	2.000.000.000	Pelatihan IKM, Promosi Produk IKM
58	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	-	58	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	-	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>		<b>Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin</b>	<b>80 %</b>	<b>300.000.000</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>		<b>Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin</b>	<b>80 %</b>	<b>300.000.000</b>	
	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>		<b>Jumlah industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi</b>	<b>25 Perusahaan</b>	<b>300.000.000</b>		<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>		<b>Jumlah industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi</b>	<b>25 Perusahaan</b>	<b>300.000.000</b>	
59	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	150.000.000	59	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	150.000.000	Melakukan pengawasan perizinan yang telah dikeluarkan wewenang provinsi (47 Perusahaan)



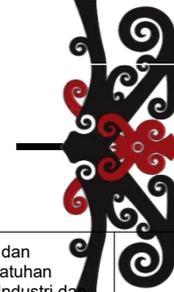
## Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



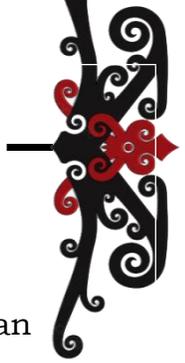
60	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	5 Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	1 Dokumen	150.000.000	60	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	5 Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	1 Dokumen	150.000.000	Melaksanakan verifikasi pemenuhan persyaratan kegiatan sektor perindustrian sesuai PP 20 Tahun 2021 (beberapa tahapan/izin-izin prinsip)
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>500.000.000</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana</b>	<b>100 %</b>	<b>500.000.000</b>	
	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>		<b>Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau</b>	<b>1 Informasi</b>	<b>500.000.000</b>		<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>		<b>Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau</b>	<b>1 Informasi</b>	<b>500.000.000</b>	
61	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	30 Dokumen	200.000.000	61	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	30 Dokumen	200.000.000	Kegiatan sosialisasi pemenuhan target industri kecil terinput ke SIINAS sebanyak 1100



Rencana Kerja Tahun 2025  
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



62	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	24 Dokumen	300.000.000	62	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	24 Dokumen	300.000.000	
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>					<b>36.831.238.443</b>	<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>					<b>51.963.000.000</b>	



### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

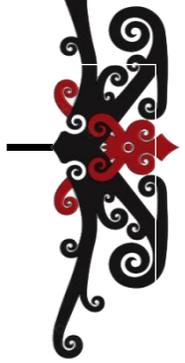
Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 2.4.

*Tabel 2.4*  
*Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan*  
*Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Utara*

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	68 UMKM	Peningkatan daya saing UMK perlu adanya bantuan dana hibah untuk pembelian alat dan bahan UMKM Kafit Livang
2	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	68 UMKM	Bantuan dana hibah untuk usaha kecil menengah (UMKM) Kafit Livang



3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Bulungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Unit	Pembangunan Pasca Pulau Bunyu
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Bulungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Unit	Pembangunan rumah Kemasan (UMKM) Tanjung Selor
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Pelatihan pengkayaan motif batik
6	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Pelatihan Pengolahan Bambu Menjadi Produk Kerajinan
7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Pelatihan Kuratorial Ekraf
8	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Nunukan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	Pembangunan Rumah Produksi Industri Pengolahan Rotan



**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi**

**3.1.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional**

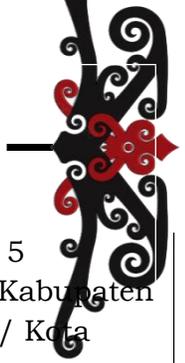
Telaahan terhadap kebijakan nasional dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dukungan terhadap prioritas nasional berdasarkan hasil rakortekrenbang disajikan pada table 3.1 sebagai berikut :

*Tabel 3.1  
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025  
yang mendukung Prioritas Nasional*

<b>No</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Program yang mendukung Prioritas Nasional</b>	<b>Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional</b>	<b>Nama Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional</b>	<b>Lokasi kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
3.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromartimindustri di Sentra Produksi melalui peran aktif	Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	5 Kabupaten / Kota
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Kabupaten / Kota
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 Kabupaten / Kota



Rencana Kerja Tahun 2025  
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

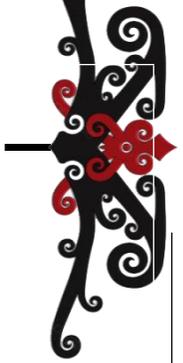


			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Kabupaten / Kota
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	5 Kabupaten / Kota
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	5 Kabupaten / Kota
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	5 Kabupaten / Kota
		Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam	5 Kabupaten / Kota



## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

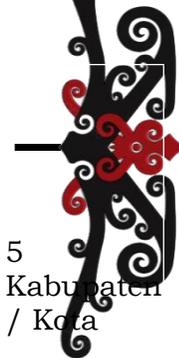


			Penyampaian Data ke SIINas	
	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Tarakan dan Nunukan
	Program pengembangan ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Luar Negeri dan Luar Kaltara
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan			Luar Kaltara	
Pameran Dagang Lokal			Kalimantan Utara	
Peningkatan Citra Produk Ekspor			Kalimantan Utara	
	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan
			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/ atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	5 Kabupaten / Kota
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	5 Kabupaten / Kota

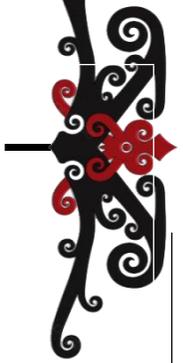


## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



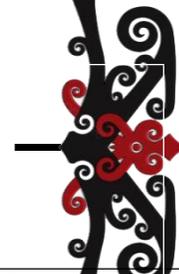
	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5 Kabupaten / Kota
			Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	5 Kabupaten / Kota
	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	5 Kabupaten / Kota
			Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Kabupaten / Kota
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Kabupaten / Kota
	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan,	5 Kabupaten / Kota



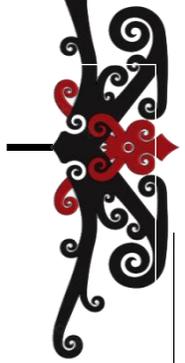
			dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
		Program pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5 Kabupaten / Kota
4.	Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	5 Kabupaten / Kota
		Program pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5 Kabupaten / Kota
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	5 Kabupaten / Kota
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	5 Kabupaten / Kota



**Rencana Kerja Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**



			Kepentingan		
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5 Kabupaten / Kota
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	5 Kabupaten / Kota
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Kabupaten / Kota
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 Kabupaten / Kota
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Kabupaten / Kota
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	5 Kabupaten / Kota
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka	5 Kabupaten / Kota	



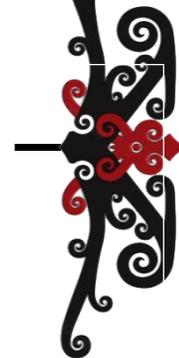
			penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	5 Kabupaten / Kota
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Kabupaten / Kota
<b>JUMLAH</b>	<b>12 Program</b>	<b>19 Kegiatan</b>	<b>35 Sub Kegiatan</b>	

### 3.1.2 Telaahan terhadap prioritas provinsi

Telaahan terhadap prioritas provinsi dilakukan terhadap:

- a. Sepuluh prioritas daerah tahun 2025 dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. Target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Perangkat Daerah pemangku Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

Hasil penelaahan terhadap prioritas daerah dituangkan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

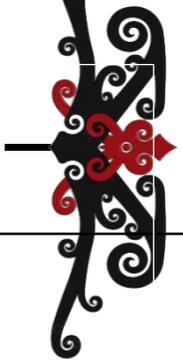


Tabel 3.2  
Indikasi program/ kegiatan/ sub kegiatan tahun 2025  
Yang Mendukung Sepuluh Prioritas Daerah

No	Prioritas Daerah	Nama Program yang mendukung prioritas daerah	Nama Kegiatan yang mendukung prioritas daerah	Nama Sub Kegiatan yang mendukung prioritas daerah	Lokasi Kegiatan
2	Mewujudkan pembangunan KUPI	Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	5 Kabupaten / Kota
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Kabupaten / Kota
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Kabupaten / Kota
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	5 Kabupaten / Kota
Program Pengelolaan Sistem Informasi	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri	5 Kabupaten / Kota		



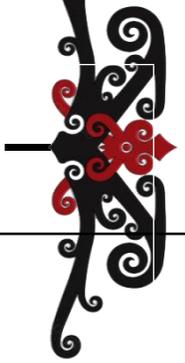
**Rencana Kerja Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**



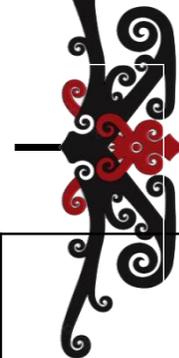
		Industri Nasional	Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Provinsi melalui SIINas	
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Kabupaten / Kota
3	Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi disetiap kabupaten/kota	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kabupaten Nunukan dan Malinau
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	5 Kabupaten / Kota



Rencana Kerja Tahun 2025  
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



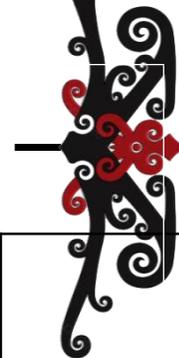
			yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Kabupaten / Kota
			Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kerjanya	Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	5 Kabupaten / Kota
4	Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kabupaten Nunukan dan Malinau
5	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota	-	-	-	



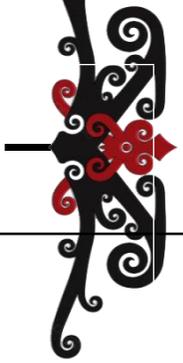
6	Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Kabupaten / Kota
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	5 Kabupaten / Kota
		Program pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5 Kabupaten / Kota
		Program pengembangan ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Luar Kalimantan Utara
				Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan
				Peningkatan Citra Produk Ekspor	5 Kabupaten / Kota
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5 Kabupaten / Kota
				Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat	5 Kabupaten / Kota



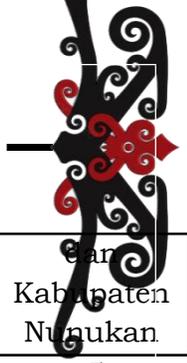
Rencana Kerja Tahun 2025  
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



				Provinsi	
	Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	5 Kabupaten / Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Kabupaten / Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Kabupaten / Kota	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	5 Kabupaten / Kota	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	5 Kabupaten / Kota		



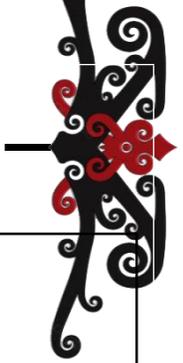
			Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Kabupaten / Kota
8	Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial.	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Kabupaten / Kota
		Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	5 Kabupaten / Kota
		Program pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5 Kabupaten / Kota
		Program pengembangan ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk	Pameran Dagang Internasional/Nasional Misi Dagang Bagi Produk	Luar Kalimantan Utara Kota Tarakan



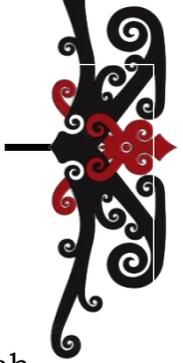
		Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Ekspor Unggulan	Kabupaten Nunukan	
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	5 Kabupaten / Kota	
		Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	5 Kabupaten / Kota
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Nunukan dan Malinau
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	5 Kabupaten/ Kota		
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	5 Kabupaten/ Kota	



**Rencana Kerja Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**



			Nasional (SIINas)	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Luar Kalimantan Utara
9	Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di setiap kabupaten/kota	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	5 Kabupaten/Kota
					Penyusunan Basis Data Usaha Kecil
<b>JUMLAH</b>		<b>12 Program</b>	<b>19 Kegiatan</b>	<b>40 Sub Kegiatan</b>	

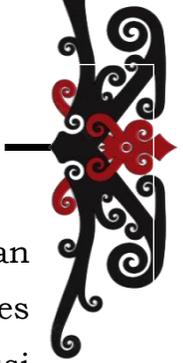


### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan rencana strategis tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut ;

Tujuan strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara :

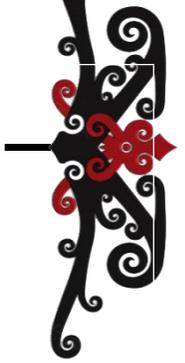
1. Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah dengan melaksanakan Program Kegiatan yang bisa meningkatkan pertumbuhan PDRB di sektor industri. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri program ini mendukung pembangunan KIPI yang ada pada prioritas daerah yang ditetapkan oleh Gubernur. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program ini mendukung sistem nasional untuk menertibkan perizinan industri dan data industri di seluruh Indonesia.
2. Meningkatkan konsumsi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan melaksanakan 4 Program yaitu Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen untuk melakukan pengawasan barang dan jasa yang beredar agar sesuai perundang-undangan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan untuk memudahkan masyarakat melaksanakan jual beli dan dalam menyediakan barang pokok penting yang di seluruh wilayah termasuk daerah perbatasan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting untuk menjaga stabilisasi barang pokok penting di Kalimantan Utara dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri berupa sosialisasi penggunaan produk dalam negeri.
3. Meningkatkan Neraca Perdagangan Ekspor Kalimantan Utara. Dengan melaksanakan 2 Program yaitu Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan untuk membantu perizinan para pelaku ekspor agar mudah mendapatkan SKA, Program Pengembangan Ekspor untuk meningkatkan produk unggulan yang berdaya saing ekspor dan melakukan pembinaan para pelaku ekspor.
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM. pengembangan produk unggulan daerah Provinsi Kalimantan Utara



melalui peningkatan daya saing produk UKM. Hal tersebut dilaksanakan melalui pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan akses permodalan bagi UKM, perluasan jaringan pemasaran dan distribusi usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia UKM dan untuk menunjang tujuan tersebut didukung oleh 3 Program yaitu Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Dan Program Pengembangan Umkm.

Adapun sasaran utama yang harus dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dalam jangka waktu tertentu, terdiri atas :

1. Meningkatnya pertumbuhan Koperasi Sehat
2. Meningkatnya UMKM yang mengakses KUR
3. Meningkatnya Pertumbuhan UMKM
4. Meningkatnya nilai ekspor bersih Kaltara
5. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah
6. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap Kesesuaian dan jaminan mutu produk
7. Meningkatnya Pasar Produk Lokal
8. Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara yang direncanakan untuk periode tahun 2025 beserta prakiraan maju 2025 disajikan dalam tabel berikut:



**Rencana Kerja Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

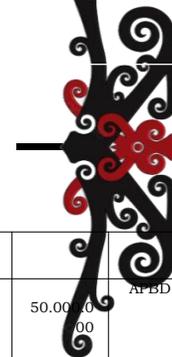


*Tabel 4.1*  
*Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026*

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				Keterangan							
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	SPM	Fokus Pembangunan (2)	Catatan /Rekomendasi	Urutas Prioritas Sub Kegiatan	
						Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target								
						Target Capaian Kinerja	Satuan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Target Capaian Kinerja	Satuan												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																						
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah				100	%																
2.17.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun					17	Dokumen														
2.17.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Kabupaten Bulung					2	Dokumen	400.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2	Dokumen	400.000.000	-	-	-	-	-	-



## Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

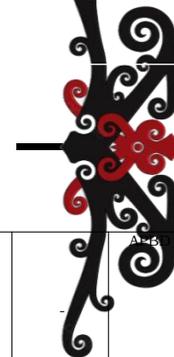


2.17.0 1.1.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kabupaten Bulungan				13	Laporan	50.000.000	APBD	Jumlah Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	13 Laporan	50.000.000	-	-	-	-	-	-
2.17.0 1.1.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bulungan				2	Laporan	70.000.000	APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	70.000.000	-	-	-	-	-	-
<b>2.17.0 1.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan</b>					<b>12</b>	<b>Bulan</b>			<b>Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan</b>	<b>12 Bulan</b>							
2.17.0 1.1.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bulungan				48	Orang/Bulan	7.620.000.000	APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	564 Orang	7.650.000.000	-	-	-	-	-	-
2.17.0 1.1.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bulungan				1218	Dokumen	1.400.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1218 Dokumen	1.650.000.000	-	-	-	-	-	-
<b>2.17.0 1.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>12</b>	<b>Bulan</b>			<b>Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>							



## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

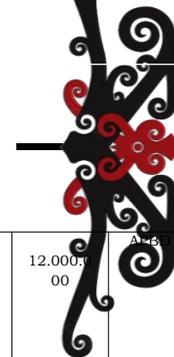


2.17.0 1.1.05. 09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Kabupaten Bulungan				80	Paket		APBD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	80 Paket	67.000.000	-	-	-	-	-	-
2.17.0 1.1.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Bulungan				15	Orang	300.000.000	APBD	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	300.000.000	-	-	-	-	-	-
<b>2.17.0 1.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</b>				<b>12</b>	<b>Bulan</b>				<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>							
2.17.0 1.1.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bulungan				4	Paket	64.000.000	APBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.000.000	-	-	-	-	-	-
2.17.0 1.1.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Bulungan				1	Paket	23.000.000	APBD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	23.000.000	-	-	-	-	-	-
2.17.0 1.1.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bulungan				5	Paket	225.000.000	APBD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	225.000.000	-	-	-	-	-	-
2.17.0 1.1.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Bulungan				9	Paket	125.000.000	APBD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	125.000.000	-	-	-	-	-	-



## Rencana Kerja Tahun 2025

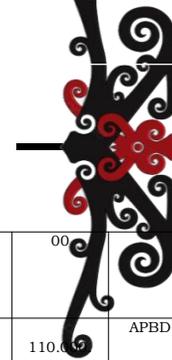
### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



2.17.0 1.1.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Bulungan				2500	Dokumen	12.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2500 dokumen	12.000.000	-	-	-	-	-	-
2.17.0 1.1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Utara dan Luar Kalimantan Utara				140	Laporan	1.500.000.000	APBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-
<b>2.17.0 1.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>					<b>3</b>	<b>Unit</b>				<b>Jumlah BMD yang diadakan</b>	<b>Unit</b>							
2.17.0 1.1.07. 05	Pengadaan Mebel			Jumlah Mebel yang disediakan	Kabupaten Bulungan				0	Unit	35.000.000	APBD	Jumlah Mebel yang disediakan	0	-	-	-	-	-	-	-
2.17.0 1.1.09. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kabupaten Bulungan				3	Unit	-	APBD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	120.000.000	-	-	-	-	-	-
<b>2.17.0 1.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>					<b>12</b>	<b>Bulan</b>				<b>Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>							
2.17.0 1.1.08.	Penyediaan Jasa			Jumlah Laporan	Kabupaten				2	Laporan	12.000.0	APBD	Jumlah Laporan	2 Laporan	12.000.00	-	-	-	-	-	-



## Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

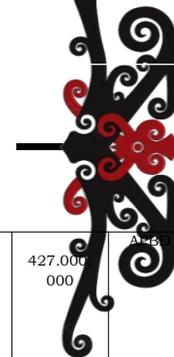


01	Surat Menyurat			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulungan						00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n	0					
2.17.0 1.1.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Bulungan				6	Laporan	110.000.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	110.000.000	-	-	-	-	-
2.17.0 1.1.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bulungan				2	Laporan	15.000.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	15.000.000	-	-	-	-	-
<b>2.17.0 1.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharannya</b>					<b>12</b>	<b>Bulan</b>				<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharannya</b>	<b>12 Bulan</b>						
2.17.0 1.1.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	Kabupaten Bulungan				15	Unit	180.000.000	APBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	15 Unit	180.000.000	-	-	-	-	-



## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



2.17.0 1.1.09. 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilita si	Kabup aten Bulung an					5	Unit	427.000 000	APB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilita si	2 Unit	177.000.0 00	-	-	-	-	-	-
2.17.0 3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT				31,52	%							Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT	36,6							
2.17.0 3.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi		Persentase koperasi yang tertib administrasi					74	%					Persentase koperasi yang tertib administrasi	76							
2.17.0 3.1.01. 01	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas , Kepercayaan, Kepatuhan, Kekinambun gan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Kabup aten Bulung an, Kabup aten Malina u, Kabup aten Tana Tidung, Kabup aten Nunuk an dan Kota Taraka n					25	Dokum en	370.000. 000	APBD	Jumlah Koperasi yang Akuntabilita s, Kepercayaan , Kepatuhan, Kekinambun gan, dan Pemberian Manfaat kepada Anggota KUKM dan Masyarakat	25 Unit Usaha	400.000.0 00	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 8	-	Fokus Pembang unan 2	Merupa kan kegiata n pemin aan dan pengaw asan koperas i dalam rangka peningk atan koperas i sehat di Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiata n No. 24
2.17.0 5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurus /pengawas yang menyampaikan RAT				66	%							Persentase pengurus /pengawas yang menyampai kan RAT	71							



## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

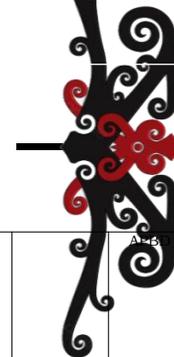


		dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																			
2.17.0 5.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat				75	Peserta					Jumlah pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat	75 Orang							
2.17.0 3.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan					75	Orang	600.000.000	APBD	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 Orang	600.000.000	-	Prioritas Daerah No. 6	-	Fokus Pembangunan 2	Merupakan kegiatan pelatihan bagi pembina, pengurus dan anggota koperasi dalam rangka peningkatan koperasi sehat di Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 6
2.17.0 7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM Yang mengakses KUR				58,67	%						Persentase UMKM Yang mengakses KUR	62,67							
2.17.0 7.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR				63	UMKM					Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR	363 UMKM							



## Rencana Kerja Tahun 2025

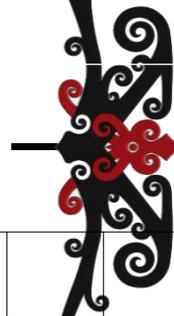
### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



2.17.0 7.1.01. 01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				68 Unit Usaha	2.041.181.301	APBD	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	73 Unit	2.355.299.431	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 6 dan No. 8	-	Fokus Pembangunan 2	Merupakan kegiatan sosialisasi permodalan untuk peningkatan kredit kepada UMKM	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 5
2.17.0 7.1.01. 02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan			Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				240	900.000.000	APBD	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	240 UMKM	900.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 6 dan No. 8	-	Fokus Pembangunan 2	Merupakan kegiatan sosialisasi permodalan untuk peningkatan kredit kepada UMKM	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 7
2.17.0 7.1.01. 0003	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil			Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan				50	200.000.000	APBD	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	50 Unit	200.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 6 dan No. 8	-	Fokus Pembangunan 2	Merupakan kegiatan sosialisasi permodalan untuk peningkatan kredit kepada UMKM	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 17



## Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



					Kota Tarakan																	
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM				8	%							Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM	95							
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Menengah		Jumlah usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah					93	Pelaku Usaha					Jumlah usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah	123 Pelaku Usaha							
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Desain dan Teknologi			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan					720	Unit Usaha	3.752.057.142	APBD	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	800 Unit Usaha	4.377.400.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 6 dan No. 8	Fokus Pembangunan 1 & 2	Merupakan kegiatan pelatihan untuk UKM	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 02	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																					
3.30	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam				97	%							kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan	98%							



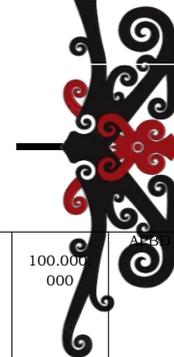
Rencana Kerja Tahun 2025  
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



		1 (satu) tahun												Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun								
3.30.0 2.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/ Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu)Tahun					3530	form					Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/ Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu)Tahun	3883 Form							
3.30.0 2.1.04. 01	Koordinasi dan sinkronisasi Layanan Penerbitan Layanan Penerbitan SKA			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan					2	Dokumen	125.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	2 Dokumen	150.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 6	-	-	Merupakan kegiatan dalam peningkatan ekspor di Kaltara	Urutis Prioritas Sub Kegiatan No. 33
3.30.0 2.1.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor		Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					1	Dokumen					Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3530 Form							



## Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



3.30.0 2.1.05. 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				2	Dokumen	100.000.000	APB	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	100.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 6	-	-	Merupakan kegiatan dalam peningkatan ekspor di Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 32
3.30.0 2.1.06	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Jumlah pengawasan pada distributor dan distribusi Perdagangan Bahan Berbahaya				1	Laporan					Jumlah pengawasan pada distributor dan distribusi Perdagangan Bahan Berbahaya	3530 Form							
3.30.0 2.1.06. 0001	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya			Jumlah Distribusi, Laporan Pengemasan dan Pengawasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				1	Laporan	100.000.000	APBD	Jumlah Distribusi, Laporan Pengemasan dan Pengawasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1 laporan	100.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 6	-	-	Merupakan kegiatan dalam peningkatan ekspor di Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 31
3.30.0 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan Yang Terbangun				0	%						Persentase Sarana Perdagangan Yang Terbangun	0%							
3.30.0 3.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas		Jumlah pembangunan dan pusat distribusi regional dan Provinsi yang dikelola				1	Lokasi					Jumlah pembangunan dan pusat distribusi regional dan Provinsi yang	1 Lokasi							



## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



													dikelola										
3.30.0 3.1.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi			Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan					1	Unit	8.900.000.000	APBD	Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	3 Unit	8.900.000.000	-	Prioritas Daerah No. 4	-	-	Merupakan salah satu kegiatan dalam menjaga inflasi di Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 10	
3.30.0 3.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan					0	Laporan	-	APBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	150.000.000	-	Prioritas Daerah No. 4	-	-	Merupakan salah satu kegiatan dalam menjaga inflasi di Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 28	
3.30.0 3.1.01.03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan					1	Laporan	100.000.000	APBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	5 Orang	100.000.000	-	Prioritas Daerah No. 4	-	-	Merupakan salah satu kegiatan dalam menjaga inflasi di Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 41	
3.30.0 4	<b>STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu</b>				<b>6</b>	<b>%</b>							<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu</b>	<b>6%</b>								
3.30.0 4.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan		<b>Jumlah ketersediaan barang pokok dan</b>				<b>12</b>	<b>Jenis</b>						<b>Jumlah ketersediaan barang</b>	<b>12 Jenis</b>								



## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		barang										pokok dan barang									
3.30.0 4.1.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				12	Laporan	250.000.000	6	APBD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	250.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 3	-	-	Merupakan salah satu kegiatan dalam menjaga inflasi di Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 20
3.30.0 4.1.01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				12	Laporan	250.000.000		APBD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	12 Laporan	250.000.000	-	Prioritas Daerah No. 3	-	-	Merupakan salah satu kegiatan dalam menjaga inflasi di Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 21
3.30.0 4.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang		Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah				6	%					Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah	6%							



## Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



		<b>terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan</b>																			
3.30.0 4.1.02. 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				12	Laporan	225.000	APBD	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	12 Laporan	200.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 3	-	-	Merupakan salah satu kegiatan dalam menjaga inflasi di Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 19
3.30.0 4.1.02. 02	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				2	Laporan	200.000.000	APBD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	200.000.000	-	Prioritas Daerah No. 3	-	-	Merupakan salah satu kegiatan dalam menjaga inflasi di Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 18
3.30.0 4.1.03	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di</b>		<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah</b>						<b>80</b>	<b>%</b>											



## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



	<b>Wilayah Kerjanya</b>																						
3.30.0 4.1.03. 01	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan					12	Laporan	100.000.000	APBD	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	100.000.000	Prioritas Nasional No. 1	-	-	-	Merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan produksi pertanian	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 29	
3.30.0 4.1.03. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan					2	Laporan	75.000.000	APBD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	2 laporan	100.000.000	Prioritas Nasional No. 1	-	-	-	Merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan produksi pertanian	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 30	
<b>3.30.0 5</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara</b>								<b>7</b>	<b>%</b>			<b>Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara</b>	<b>7%</b>								
3.30.0 5.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi		<b>Jumlah Pelaku Usaha yang telah difasilitasi</b>					<b>61</b>	<b>Pelaku Usaha</b>					<b>Jumlah Pelaku Usaha yang telah</b>	<b>64</b> <b>Pelaku Usaha</b>								



**Rencana Kerja Tahun 2025**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara**

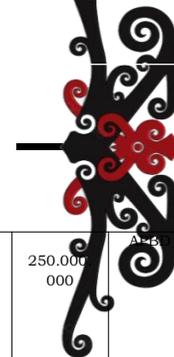


													difasilitasi										
3.30.0 5.1.01. 01	Pameran Dagang Internasional/ Nasional			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan					20	Pelaku Usaha	750.000.000	APBD	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	20 Pelaku Usaha	750.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 6 dan No. 8	-	Fokus Pembangunan 1 & 2	Merupakan kegiatan promosi produk unggulan Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 11	
3.30.0 5.1.01. 02	Pameran Dagang Lokal			Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan					27	Pelaku Usaha	270.000.000	APBD	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	30 Pelaku Usaha	300.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 6 dan No. 8	-	Fokus Pembangunan 1 & 2	Merupakan kegiatan promosi produk unggulan Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 13	



## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

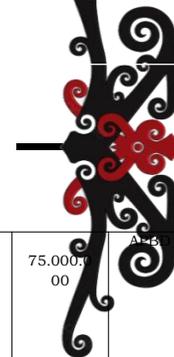


3.30.0 5.1.01. 03	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				6	Pelaku Usaha	250.000.000	APBS	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha	250.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 6 dan No. 8	-	-	Merupakan kegiatan promosi produk unggulan Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 12
3.30.0 5.1.01. 04	Peningkatan Citra Produk Ekspor			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				8	Produk	355.000.000	APBD	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	8 Produk	375.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 6 dan No. 8	Fokus Pembangunan 1 & 2		Merupakan kegiatan promosi produk unggulan Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 08
3.30.0 5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar				0,5	%						Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	0,5%							
3.30.0 6.1.01	Pelaksanaan perlindungan Konsumen di seluruh daerah Kabupaten/kota		Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen dikabupaten/ kota					5		Kabupaten/Kota			Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen dikabupaten / kota	5 Kabupaten/Kota							



## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



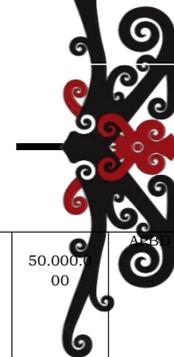
3.30.0 6.1.01. 01	Pemberdayaan Konsumen dan kelembagaan perlindungan Konsumen			Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				2	BPSK	75.000.000	APBD	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	2 BPSK	50.000.000	Prioritas Nasional No. 1	-	-	-	Merupakan kegiatan dalam rangka perlindungan konsumen	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 34
3.30.0 6.1.01. 02	Peningkatan Hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				2	LPKSM	75.000.000	APBD	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	2 LPKSM	50.000.000	Prioritas Nasional No. 1	-	-	-	Merupakan kegiatan dalam rangka perlindungan konsumen	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 35
3.30.0 6.1.01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen			Jumlah Ditangani Pengaduan Konsumen yang diselesaikan	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan				12	Pengaduan	50.000.000	APBD	Jumlah Ditangani Pengaduan Konsumen yang diselesaikan	12 pengaduan	50.000.000	Prioritas Nasional No. 1	-	-	-	Merupakan kegiatan dalam rangka perlindungan konsumen	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 36





## Rencana Kerja Tahun 2025

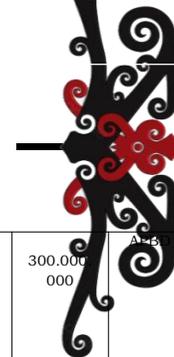
### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



3.30.0 7.1.01. 03	Pemantauan Mutu Produk			Jumlah produk potensial yang dipantau	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				3		50.000.000	APBD	Jumlah produk potensial yang dipantau	3Produk	50.000.000	Prioritas Nasional No. 1	-	-	-	Merupakan kegiatan dalam rangka perlindungan konsumen	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 39
3.30.0 7.1.01. 03	Pengembangan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi Layanan			Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				3		50.000.000	APBD	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	3 Sertifikat	50.000.000	Prioritas Nasional No. 1	-	-	-	Merupakan kegiatan dalam rangka perlindungan konsumen	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 40
3.30.0 8.1.03	Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa disuruh daerah kabupaten/kota		Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen dikabupaten/ kota					5	Kabupaten/Kota				Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen dikabupaten / kota	5 Kabupaten/Kota							



## Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

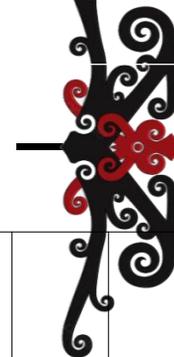


3.30.0 8.1.03. 01	peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan /atau jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen dan tertib niaga			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan					5	Laporan	300.000.000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	5 Laporan	250.000.000	Prioritas Nasional No. 3	-	-	-	Merupakan kegiatan dalam rangka perlindungan konsumen	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 25
3.30.0 7	<b>PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Persentase Kontribusi iproduk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga				90	%							Persentase Kontribusi iproduk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga	90%							
3.30.0 7.1.03	<b>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>		Persentase kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan					90	%					Persentase kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan	90%							
3.30.0 7.1.03. 01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi			Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan					1	Laporan	500.000.000	APBD	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	20 Pelaku Usaha	500.000.000	-	Prioritas No. 6	-	Fokus Pembangunan 1 & 2	Merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan produk dalam negeri	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 26



# Rencana Kerja Tahun 2025

## Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara

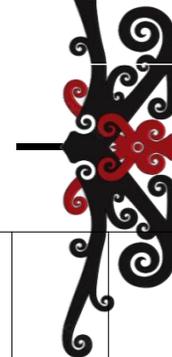


					n																	
3.30.0 7.1.03. 02	Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri			Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan				1	Laporan	550.000.000	APBD	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	250 Peserta	550.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas No. 6	-	Fokus Pembangunan 1 & 2	Merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan produk dalam negeri	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 27	
<b>3.31.0 2</b>	<b>Urusan Perindustrian</b>																					
<b>3.31.0 2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana</b>				<b>100</b>	<b>%</b>															
<b>3.31.0 2.1.01</b>	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>		<b>jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>					<b>5</b>	<b>Kegiatan</b>				<b>jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>3 Kegiatan</b>								
3.31.0 2.1.01. 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau				3	Dokumen	200.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	3 Dokumen	200.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 2	-	Fokus Pembangunan 2	Merupakan kegiatan dalam rangka pembangunan	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 3	



## Rencana Kerja Tahun 2025

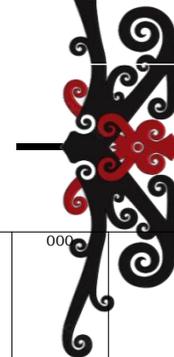
### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



	Perwilayahan Industri			Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	u, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan							Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri							KIPI	
3.31.0 2.1.01. 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan					200.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	200.000.000	Prioritas Nasional No. 1	Prioritas Daerah No. 2	-	Fokus Pembangunan 2	Merupakan kegiatan dalam rangka pembangunan KUPI	Urutas Sub Kegiatan No. 4
3.31.0 2.1.01. 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan					700.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	700.000.000		Prioritas Daerah No.2 dan No.8	-	Fokus Pembangunan 2	Dalam rangka meningkatkan perindustrian di Kaltara	Urutas Sub Kegiatan No. 9
3.31.0 2.1.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan			Jumlah Dokumen	Kabupaten					600.000.	APBD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	600.000.0	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Fokus Pembang	Merupakan	Urutas Prioritas



## Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



05	Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan					en	000	Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	en	00	No. 1	No. 6	uan 1 & 2	kegiatan dalam rangka meningkatkan produktivitas industri Kaltara	Sub Kegiatan No. 1		
3.31.02.1.01.05	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan							APBD	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0	-	-	Prioritas Daerah No. 2	-	Fokus Pembangunan 2	Merupakan kegiatan dalam rangka pembangunan KIPPI	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 22
3.31.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin</b>				<b>80</b>	<b>%</b>						<b>Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin</b>	<b>100%</b>							
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)		Jumlah industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi				<b>25</b>	<b>Perusahaan</b>					Jumlah industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan	<b>27</b>	<b>Perusahaan</b>						



## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



													Provinsi									
3.31.0	Kewenangan Provinsi																					
3.31.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Utara					1	Dokumen	150.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	150.000.000	-	Prioritas Daerah No. 2	-	Fokus Pembangunan 2	Merupakan kegiatan pengawasan perusahaan industri di Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 14
3.31.01.02	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan	Provinsi Kalimantan Utara					1	Dokumen	150.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri	1 Dokumen	150.000.000	-	Prioritas Daerah No. 2	-	Fokus Pembangunan 2	Merupakan kegiatan pengawasan perusahaan industri di Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 15



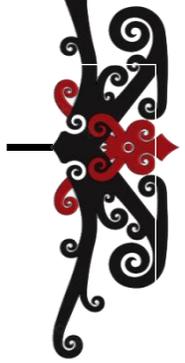


## Rencana Kerja Tahun 2025

### Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



3.31.0 4.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau				1	Informasi					Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau	1 Informasi							
3.31.0 4.01.0 2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Provinsi Kalimantan Utara				27	Dokumen	200.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	30 Dokumen	150.000.000	-	Prioritas Daerah No. 2	-	Fokus Pembangunan 2	Merupakan kegiatan pengawasan perusahaan industri di Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 16
3.31.0 4.01.0 3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Provinsi Kalimantan Utara				23	Dokumen	300.000.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	25 Dokumen	300.000.000	-	Prioritas Daerah No. 2	-	Fokus Pembangunan 2	Merupakan kegiatan pengawasan perusahaan industri di Kaltara	Urutas Prioritas Sub Kegiatan No. 23



**BAB V**  
**PENUTUP**

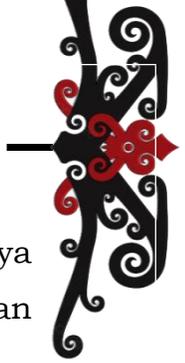
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara diharapkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA- Perangkat Daerah) Tahun 2025. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Perangkat Daerah mengevaluasi program – program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Kalimantan Utara. Penyusunan Renja didasarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah :



## Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Prov. Kaltara



1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Dengan tersusunnya renja Dinas Perindustrian, Peragangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan didalam dokumen RKPD, RPJMD yang sekaligus akan mendukung perwujudan visi kepala daerah priode 2021-2026 ; **“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”** dan tema RKPD tahun 2025 **“Pemantapan Industri Dan Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah”**. Serta misi ke 6 dan 10 dari Gubernur Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, 29 April 2024

Kepala Dinas



Hj. Hasmyani, SH., MM  
Pembina TK. I, IV/b  
NIP. 19730717 200312 2 008